Nama : Narges Fitria Azzahra

Nim: 70200120042

KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN DIBIDANG KESEHATAN

Manusia adalah objek utama dalam peradaban dunia. Dalam skala internasional dikenal adanya tujuan posisi manusia sebagai central dalam pembangunan dan peradaban, menjadi pembangunan Milenium. Kesepakatan tersebut tercetus dalam forum KTT tahun 2000. Forum yang berkomitmen atas visi kebangsaan khususnya di sektor pembangunan. Pembangunan manusia diartikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini terungkap dalam publikasi United Nations Development Programme (UNDP) melalui Human Development Report tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia ini mengutamakan adanya empat unsur diantaranya produktivitas (productivity), pemerataan (equity), kesinambungan (sustainability) dan pemberdayaan (empowerment). IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor kesehatan, pendidikan dan pendapatan. IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator dasar, yaitu: usia, ilmu yang dimiliki, dan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berpengaruh satu sama lain.

Strategi pembangunan suatu negara harus mampu meningkatkan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Beberapa tahun belakangan ini pemerintah banyak mengambil program atau kebijakan yang mengangkat tentang kondisi sosial dan ekonomi. Namun, kenyataannya pembangunan nasional secara menyeluruh tidak dapat dilakukan hanya dengan pengelolaan

kewenangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemerataan pembangunan nasional, khususnya dalam hal meningkatkan sumber dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan manusia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar dimasyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan – permasalahan tersebut terdiri dari kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan. Namun persoalan yang terjadi adalah capaian pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Pada saat ini persoalan tentang capaian pembangunan manusia menjadi perhatian penyelenggara pemerintah. Di era kepemimpinan Jokowi bukan hanya pembangunan fisik namun juga banyak sektor pertumbuhan untuk membangun manusia yang lebih beradab coba untuk diupayakan oleh pemerintah. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Maka dari itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Humant Development Indexs (HDI) (Maiharyanti, 2010)

Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan Desentralisasi memiliki kebijakan atas keputusan di setiap daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menciptakan pendapatan daerahnya serta melakukan alokasi untuk prioritas pembangunan di daerahnya secara mandiri, serta diharapkan dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk

mengembangkan wilayahnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut berperan menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu daerah dan juga kemajuan nasional.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk hal – hal yang bersifat positif. Sebagai contoh untuk melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program – program untuk kepentingan publik (Setyowati dan Suparwati, 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah dilakukan atas beban APBD. Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan tersebut dalam bentuk alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik non fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut antara lain : indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi.

Salah satu perangkat yang selama ini banyak digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan peran tersebut adalah perangkat kebijakan fiskal. Di antara instrumen kebijakan fiskal tersebut, ada instrumen dalam bidang pengalokasian dana atau anggaran pembangunan ke bidang yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, irigasi, transportasi, dan sebagainya (Sasana, 2009). Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri.

Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup, maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia (Sahrah, 2007). Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi riil per kapita (Delavallade, 2006).

Menurut Christy dan Adi (2009) IPM dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya pertumbuhan ekonomi (PE). Hubungan antara PE dan pembangunan ekonomi bersifat timbal, artinya apabila terdapat PE maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya. PE secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRD). Menurut Marhaeni dkk (dalam Ardiansyah dkk, 2014) PE merupakan syarat perlu untuk meningkatkan IPM dan harus disertai dengan syarat cukup, yaitu pemerataan pembangunan melalui distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai. Sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Widodo (2011) menyatakan bahwa ada dua sektor yang perlu diperhatikan pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan.